

PENELITIAN

REFLEKSI POLA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

*(Fenomena Keagamaan di Jawa Tengah, Bali dan
Kalimantan Barat)*

OLEH ARIFUDDIN ISMAIL*

ABSTRACT :

In a plural community, harmony among religious followers is undeniable although in fact there have been many social conflicts with religious nuance in some part of Indonesia. Focus of this research is how the pattern of harmony in Indonesia connected with social dimension does. Finding of this research shows that religious tolerance will grow up when there is a space for dialogue. In social and cultural space discussion among believers will be naturally developed without any coercion. By a local tradition dialog, an ego can decrease indirectly. Even a cloth of religion recognized as identity can be leaved.

Keywords : Dialogue, culture, harmony

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara ideal, agama merupakan rahmat bagi seluruh alam sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada makhluknya. Cinta kasih itulah yang semestinya direfleksikan dalam kehidupan melalui hubungan sosial, agar bisa saling mengenal. Dalam teologi Kristen dikenal istilah *credenta* dan *agenda*. *Credenta* mengacu pada apa yang diimani atau dipercayai, yang dapat diungkapkan melalui pengakuan iman dan konfesi. Sedangkan agenda menunjukkan pada perilaku dan sikap etis serta moral yang dikerjakan berdasarkan *credenta*. Konsep teologi Kristen ini juga dimiliki oleh agama-agama lain, (seperti: *iman*, *islam*, dan *ikhsan* dalam Islam). Dengan konsep itu, seharusnya keimanan seseorang pada Tuhannya tidak bisa diwujudkan

* Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd. adalah peneliti bidang kehidupan keagamaan pada Balai Litbang Agama Semarang

secara abstrak semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan kongkrit dalam kehidupan di masyarakat.

Namun dalam kenyataan, prinsip yang baik ini tidak selalu dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam sejarahnya, agama secara ideal dan normatif, diharapkan membawa kesejukan sebagai rahmat umat manusia, tetapi faktanya tidak selalu demikian. Agama justru sering dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan permusuhan.

Dalam sejarah umat manusia, sinyalemen pemanfaatan agama sebagai senjata untuk konflik telah terbukti. Pada abad pertengahan di Eropa misalnya, berkorban perang salib dengan dalih membela Yerusalem dari serangan Islam. Begitu juga yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bangsa ini memporakporandakan kebudayaan negeri jajahan atas nama salib. Di Srilangka, separatis Tamil memakai nama agama untuk tujuan memisahkan diri. Di India, Partai Janata membangkitkan konflik emosi keagamaan untuk memperoleh simpati dari kaum Hindu Ortodoks. Di Nigeria, Islam dan Kristen dipertentangkan hanya agar seseorang tetap bertahan sebagai presiden. Di Sudan, kaum Kristen menjadi kurban berbagai intimidasi, tetapi di Kosovo, umat Islam ditindas oleh kaum Kristen Ortodoks demi kemenangan politik. (Yewangoe, AA. 2009)

Situasi konflik agama juga dialami Indonesia dalam dasawarsa terakhir. Berbagai kerusuhan terjadi di daerah, antara lain di Tasikmalaya, Situbondo, Kupang, Sambas, Poso dan juga di Maluku. Padahal, Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang plural, beradab, dan memiliki semangat teloransi antara satu dengan yang lainnya dengan semangat kerukunan. Perbedaan agama di Indoensia bukan merupakan hal baru, akan tapi sudah terpatri sejak nenek moyang. Sayang sekali, suasana kerukunan kehidupan di masyarakat itu diusik secara brutal oleh berbagai kepentingan sempit dari pihak-pihak yang menginginkan Indonesia bercerai-berai melalui konflik sosial.

Upaya untuk membangun kerukunan agama kembali setelah tercerai-berainya masyarakat akibat dari konflik agama sangat diperlukan dalam membangun harmoni kehidupan. Kerukunan umat beragama merupakan bagian dari pilar pembangunan, yang memberikan pengaruh besar pada keberhasilan. Dengan semakin mantapnya kerukunan antar umat beragama maupun intern umat beragama, akan semakin kokoh pula persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat yang sama, upaya untuk memanfaatkan agama untuk melegitimasi konflik sosial akan semakin sulit dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji mengenai bentuk kerukunan umat beragama di Indonesia, dan dimensi sosial yang mempengaruhi bentuk kerukunan umat beragama di Indonesia dimaksud.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat. Wilayah Jawa Tengah dipilih Kabupaten Semarang, tepatnya Ambarawa; Kabupaten Temanggung, yaitu di Kecamatan Kaloran, Kota Salatiga dan Kabupaten Kudus. Untuk wilayah Provinsi Bali dipilih Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan. Kemudian, untuk wilayah Kalimantan Barat dipilih Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Sungai Pinyuh. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposif. Pertimbangan bahwa ada pola-pola kerukunan yang berbeda antar wilayah berdasarkan pada keunikan khasanah lokal.

Secara umum metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, studi dokumen, dan pengamatan. Data diambil dengan teknik *snowball* melalui informan kunci yaitu tokoh agama/adat yang berpengaruh. Informasi awal dari informan kunci terus dikembangkan. Data-data yang tidak mendukung fokus penelitian direduksi. Hasil dari proses reduksi data setelah mendapat pengujian derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) di sajikan dalam paparan data untuk dianalisa guna mendapatkan kesimpulan.

TEMUAN PENELITIAN

Potensi kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis. Ranah sosial inilah yang harus dipelihara, dijaga sebagai bentuk ruang dialog. Secara umum, dari hasil penelitian di sembilan lokasi ditemukan ada faktor-faktor yang bisa menjadi sarana/wadah sosial terciptanya kerukunan yaitu, tradisi, adat/budaya, tokoh agama, dan organisasi kelembagaan masyarakat/pemerintah yang mestinya dapat dikembangkan. Dari hasil analisa pengelompokan data berdasarkan wilayah provinsi, ditemukan adanya tipologi yang berbeda antarwilayah, sesuai ruang interaksi antar umat beragama.

Kerukunan Masyarakat di Jawa Tengah

Dari empat lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, pola interaksi umat beragama yang mengarah pada bentuk kerukunan yang terwadahi dalam tradisi lokal. Di Kecamatan Kaloran Temanggung, ditemukan tradisi gotong-royong, *nyadran*. Di Ambarawa terdapat tradisi *cheng beng* (*nyadran ala Khonghucu*), *sonjo*, dan lebaran bersama. Sementara untuk wilayah Kudus ditemukan tradisi larangan menyembah sapi, sebagai bentuk

penghormatan pada kepercayaan Hindu.

Gotong rotong dalam istilah Jawa disebut sambatan yaitu melakukan kegiatan bersama untuk sebuah tujuan tertentu. Gotong royong biasa dilakukan dalam rangka memperbaiki rumah, sarana sosial, perhelatan perkawinan, perkuburan, dan aktifitas-aktifitas sosial lainnya termasuk perbaikan tempat ibadah. Dalam acara gotong-royong, tokoh yang paling berperan yaitu tokoh masyarakat.

Nyadran adalah tradisi yang biasanya dilakukan pada bulan *Ruwah* (penanggalan jawa) atau *Sya'ban*. *Nyadran* dilakukan dalam bentuk mengirim do'a pada arwah leluhur, nenek moyang, kerabat, yang telah meninggal dunia. *Nyadran* dapat dilakukan di perkuburan atau dirumah sendiri melalui acara *kenduri*. *Nyadran* yang mengandung nilai kerukunan yaitu *nyadran* yang dilakukan diperkuburan desa, karena bisa melibatkan berbagai kelompok agama. Kelompok agama yang terlibat, dengan kesadarannya meninggalkan atribut keagamaan lebur dalam ritual tradisi.

Tradisi "sonjo" dilakukan sebagai bentuk silaturahmi antar warga, sanak famili, kerabat, dan saudara. Pada bentuk sosial, *sonjo* umumnya untuk menghormati kematian dengan "melek-melek" (terjaga sampai malam), atau dalam malam-malam perhelatan berkaitan dengan upacara daur hidup. Dengan *sonjo* masyarakat dapat mendo'akan seseorang yang telah meninggal dunia tanpa membedakan agama apapun. (Sulaiman, 2010)

Lebaran bersama dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan sebagai sesama manusia. Lebaran bersama diisi dengan saling mengunjungi antar kerabat, saudara, teman, tanpa membedakan agama. Dalam pertemuan itulah, mereka bisa saling memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama bergaul, tanpa membedakan latar belakang agama.

Kalau ditengok pada literature lain, sebagian dari tradisi lokal yang ditemukan hampir dapat ditemukan pada wilayah lain di Jawa Tengah. Tradisi lokal seperti gotong royong, *nyadran*, *sonjo*, dan lebaran bersama merupakan bagian dari kearifan tradisi Jawa. Tradisi itu merupakan bagian dari tradisi lama yang telah mendapatkan kondifikasi dari agama-agama baru, terutama Islam. Sehingga melalui tradisi ini dapat terjalin komunikasi antara sebuah komunitas dengan keyakinan lokal yang telah menggumpal. (Sulaiman, 2010; Sodli, 2010; Fauzi, 2010; Ismail 2010)

Pola Kerukunan Kalimantan Barat

Pada ranah sosial, pola interaksi antar umat beragama di Kalimantan Barat mengarah pada simbolisasi adat dengan agama. Identifikasi pemeluk agama terkait dengan identifikasi etnis dengan sistem adatnya. Seperti pemeluk Islam di Kalimantan Barat diidentikkan dengan etnis Melayu, meskipun itu berasal dari suku dayak. Bahkan anggota suku Dayak yang memeluk Islam dianggap

telah keluar dari anggota suku dengan menanggalkan identitas budayanya. (Rahmadani, 2010)

Kekuatan pengaruh suku yang begitu kuat dalam masyarakat Kalimantan memunculkan pengukuran identitas etnis dalam bentuk organisasi massa seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Kerukunan Sulawesi Selatan (KSS) Paguyuban Masyarakat Jawa (PMJ), Kerabat Batak (KB) dan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Dengan adanya organisasi massa beridentitas etnik tentu diharapkan bisa mempermudah pembentukan pola kerukunan umat beragama di Kalimantan. Akan tetapi dalam praktik kehidupan sosial, keberadaan organisasi massa itu justru lebih dekat bersentuhan dengan politik praktis. Padahal organisasi massa tersebut selain sebagai identitas etnis juga melekat simbol-simbol agama.

Dominasi adat dalam kehidupan masyarakat sebetulnya bisa menjadi modal sosial menciptakan kerukunan umat beragama. Akan tetapi adat justru lebih berperan dalam ranah politik. Akibatnya pola kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat tidak membumi. Dalam pola kerukunan di Kalimantan Barat tidak ditemukan bentuk kerukunan yang terwadahi secara kuat dalam kultur budaya. Akibatnya, pola kerukunan antar umat beragama masih berada pada dataran kulit, hanya sebatas untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi.

Akibat dari pola sosial seperti itu, bentuk kerukunan yang ada hanya sebatas kerukunan sebagai warga masyarakat. Bentuk kerukunan yang ada yaitu saling mengunjungi ketika ada perhelatan perkawinan, kelahiran atau kematian. Bentuk kerukunan yang lebih luas, yaitu ketika terjadi acara berkaitan dengan peringatan hari-hari besar nasional seperti peringatan hari kemerdekaan RI, upacara robok-robok, upacara capgomeh, dan upacara naik dangau. Keterlibatan anggota agama lain dalam acara itu, hanya sebatas tamu undangan, penonton atau panitia pendukung. (Haryanto, 2010; Rahmadhani, 2010; Mawardi, 2010)

Pola Kerukunan di Bali

Nilai-nilai budaya di Bali tidak bisa terlepas dengan pengaruh Agama Hindu. Tidak dapat dihindari bahwa pengaruh Agama Hindu dan budaya India di Bali demikian besarnya, hal ini dibuktikan dari berbagai peninggalan purbakala seperti diungkapkan oleh Swellengrebel (1960:17), yaitu: sumber utamanya adalah prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh para raja yang banyak jumlahnya baik yang tertulis pada batu maupun pada logam (tembaga).

Prasasti-prasasti itu menceritakan para raja yang memerintah dan para menterinya, hubungannya dengan administrasi pemerintahan pusat dan orang-orang di desa-desa, peraturan di bidang keagamaan, aturan yang

berhubungan dengan pengairan, perpajakan, dan sebagainya. Sumber lainnya adalah peninggalan purbakala, arca-arca dan artifak-artifak, sumber-sumber teks berupa berbagai manuskrip (lontar) yang cukup banyak jumlahnya.

Posisi agama sebagai bagian dari budaya di masyarakat Bali, menjadikan agama Hindu menempati posisi penting dalam ranah sosial. Dominasi kebudayaan Hindu sebagai mayoritas menjadikan pola kehidupan di Bali di pengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu, sehingga posisi agama-agama lain hanya menjadi bagian kecil dari warna sosial. Dalam posisi seperti itu maka ruang interaksi budaya antar umat agama dengan agama lain hampir tidak ada karena agama lain di luar agama Hindu tidak mampu mewarnai corak budaya Bali.

Dalam sosial budaya seperti itu, Lembaga Adat Banjar sebagai pusat kegiatan sosial menempati posisi cukup strategis untuk menjaga harmoni kerukunan umat beragama. Fungsi Banjar sebagai bagian dari penjaga budaya Bali memberikan pengaruh kuat dimasyarakat dalam aktifitas sosial. Konsep “nyama braya” hidup bersama menempatkan persaudaraan senegara, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama umat manusia.

Selain *nyama bray* di Banjar Adat juga memiliki tradisi *sima karma* yaitu upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat baik dalam bentuk saran, masukan hingga kritik, yang diadakan sebulan sekali dengan tidak melihat latar belakangnya. Mereka yang datang dalam forum *sima karma* bisa berdialog dengan bebas tanpa membedakan latar bekang agama.

Pada kegiatan sosial terdapat tradisi gotong-royong. Gotong royong dilakukan sebagai kewajiban warga terhadap lingkungan sosialnya. Gotong royong biasanya dilakukan atas perintah ketua adat dalam bentuk kebersihan lingkungan atau persiapan dalam acara perhelatan seperti pernikahan. Dalam pernikahan inilah ada tradisi *ngejot*. *Ngejot* merupakan bentuk penghormatan pada tamu muslim pada perhelatan perkawinan dengan memberikan hidangan khusus, yaitu hidangan yang diolah dengan cara muslim untuk menghindari terampurnya makanan dengan daging bagi. (Darno, 2010; Dahlan, 2010)

ANALISIS HASIL

Selama ini masyarakat dan negara masih terjebak oleh slogan Indonesia adalah negara yang masyarakatnya penuh dengan toleransi, sehingga cenderung menafikan realitas bahwa agama mengandung sumber “penyakit” yaitu potensi konflik. Slogan teloransi menjadikan masyarakat dan pemerintah lupa memetakan dan terutama menjaga potensi-potensi kerukunan antar umat beragama. Sehingga ketika terjadi konflik bernuansa agama merebak di Indonesia, masyarakat dan pemerintah menjadi terkaget-kaget.

Jauh sebelumnya, Huntington (2005) meramalkan akan terjadi benturan peradaban memicu konflik yang didalamnya agama memberikan peran. Meskipun secara substansi, konflik yang terjadi bukan semata-mata

konflik agama tetapi benturan-benturan sosial di masyarakat yang dipicu oleh kepentingan sosial ekonomi. Sejalan dengan Huntington, menurut Meyer (dalam Manoppo : 2005) substansi dasar penyebab konflik adalah ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan manusia yang didukung oleh faktor-faktor pemicu lain yaitu: nilai, struktur, sejarah, emosi dan komunikasi, seperti pada gambar.1



Posisi agama sebagai alasan konflik. Hal ini dikarenakan menyangkut nilai kebenaran yang mutlak. Agama mengandung nilai-nilai kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Ajaran agama bagi pemeluknya adalah pegangan sepanjang hidupnya. Kebenaran absolut agama ini dibutuhkan sebagai peneguh eksistensi keyakinan untuk menghilangkan keimbangan.

Kegagaman dialog agama pada sisi substansi agama sebagai ajaran, tentu membutuhkan ruang pada ranah sosial. Dialog umat beragama hanya bisa dibangun dan dimungkinkan terwujud ketika ada ruang sosial yang dibangun bersama oleh umat beragama tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Faktor yang memungkinkan terbangunnya ruang sosial sebagai ruang dialog secara alamiah adalah melalui pendekatan budaya. Oleh karenanya pemeliharaan khasanah tradisi budaya lokal menjadi sangat diperlukan.

Dari hasil temuan penelitian, forum-forum pertemuan yang secara alamiah terbentuk di masyarakat sebagai bagian dari tradisi lokal memungkinkan terbentuk ruang dialog antar agama. Dengan adanya dialog melalui tradisi, secara tidak langsung ego agama menjadi berkurang. Bahkan "baju" agama yang dipandang sebagai pegangan hidup dapat ditanggalkan sementara. Dialog agama pada ruang budaya melalui tradisi ini nampak dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah. Pelaksanaan tradisi seperti *nyadran*, *sonjo*, tidak menyembelih sapi, dilaksanakan bukan atas pertimbangan ajaran agama, tetapi untuk menjalankan tradisi nenek-moyang.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, karena dominasi adat dalam ruang sosial

yang didalamnya terdapat kepentingan politik, maka bentuk kerukunan yang ada di Kalimantan tidak dapat dibangun secara utuh. Kesadaran umat untuk melakukan hubungan kerukunan hanya sebatas dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial. Nampak masih ada kepentingan yang bersifat kesukuan, rasa ingin menonjolkan suku masih ada. Padahal keberadaan majlis adat sangat berkaitan dengan simbol-simbol agama. Maka ketika ada kepentingan politik yang jauh lebih besar, bangunan kerukunan yang ada akan mudah runtuhan. Seperti yang terjadi pada realitas sosial masyarakat di Sungaipinyuh. Akibat dari pengelompokan masyarakat berdasarkan keasalan (suku), seringkali terjadi benturan dengan pola tradisi adat yang semula masalah pribadi berlanjut menjadi solidaritas etnis yang membawa bendera agama. Bahkan, dengan adanya legalitas kelompok yang terwadahi dalam dewan adat, muncul perasaan berkuasaan. Seperti contoh kasus ketika pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan SK No. 127 Tahun 2008 tentang jual beli, pemasangan petasan, dan pelaksanaan arakan naga/barongsai. Bagi kalangan Cina itu dianggap membatasi ekspresi warga keturunan Cina di Kalimantan Barat. Sementara itu kelompok Deklarasi Melayu Bersatu menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah.

Di propinsi Bali, dominasi Hindu dalam kebudayaan Bali memberikan dampak besar pada pola kerukunan masyarakat Bali. Pada posisi ini, kehidupan sosial keagamaan tidak luput dari hegemoni agama Hindu. Akibatnya, pendatang/agama lain diluar Bali tidak memiliki ruang budaya secara longgar dalam mengekspresikan keyakinan agama. Karena ranah budaya Bali telah menyatu dengan ranah agama Hindu.

Penguasaan agama pada ranah budaya di Bali memberikan dampak pola kerukunan umat beragama hanya bisa dimungkinkan tercipta ketika ada kebesaran hati agama Hindu dan kesadaran dari para pendatang untuk memahami kebudayaan masyarakat Bali. Di sinilah posisi tentang para tokoh agama, untuk menyadarkan umat agar bisa saling memahami, dan saling menghormati. Peran kuat para tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran saling menghormati. Tokoh agama dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga mayoritas dengan minoritas.

Pada dataran formal, hubungan umat beragama membutuhkan pola pengaturan yang dapat dipahami oleh semua agama. Peran FKUB dalam kegiatan sosial keagamaan menjadi sangat penting. FKUB sebagai wadah kerukunan umat beragama, menempati posisi sebagai penengah, pemberi informasi, dan membawa suasana kerukunan. Pada tingkatan formal hubungan kemasyarakatan, terutama pada perayaan hari-hari besar agama seperti nyepi menuntut semua agama terlibat dalam bentuk penghormatan.

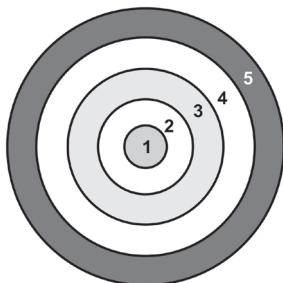
Konteks kerukunan yang didominasi oleh salah satu agama sebagai mayoritas yang menguasai budaya dapat menumbuhkan perasaan

keterpaksaan bagi minoritas. Karena itu, jika kelompok minoritas agama di Bali dapat tumbuh menyamai agama Hindu sebagai mayoritas, ekses sosial terkait dengan agama dapat dengan mudah muncul.

Dari analisa ini dapat dirumuskan sebuah sintesa tiga tipe kerukunan atas dasar faktor yang berpengaruh. Tiga tipe kerukunan dapat digambarkan sebagai berikut :

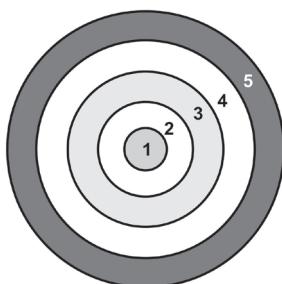
Dari analisa di atas, idealnya bangunan kerukunan beragama adalah sebagaimana yang ada di Jawa Tengah, meskipun tidak berarti tidak memiliki tantangan yang cukup besar dari kalangan internal agama itu sendiri. Tantangan yang ada yaitu nilai-nilai adat yang dijalankan oleh umat beragama bisa jadi dinilai mengotori kemurnian ajaran agama. Tradisi adat tertentu dinilai mengandung nilai kesyirikan, sehingga ajaran agama perlu

Gambar : 2
Pola Kerukunan di Jawa Tengah



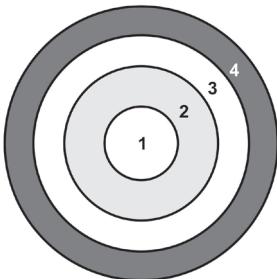
1. Pusat Kerukunan
2. Tradisi Lokal
3. Ajaran Agama
4. Tokoh Agama
5. Kelembagaan Masyarakat/Pemerintah

Gambar : 3
Pola Kerukunan di Kalimantan Barat



1. Pusat Kerukunan
2. Adat
3. Tokoh Adat/Agama
4. Ajaran Agama
5. Kelembagaan Masyarakat/Pemerintah

Gambar : 4
Pola Kerukunan di Bali



1. Pusat Kerukunan
2. Budaya Bali
3. Tokoh Adat dan Agama
4. Kelembagaan Masyarakat/Pemerintah

dimurnikan seperti sumber aslinya.

Proses purifikasi atau pemurnian ini akan menjadi awal munculnya ketegangan antara agama di satu sisi dan tradisi lokal di sisi yang lain. Saat ini, ada kecenderungan proses otentifikasi penyebaran agama-agama di masyarakat. Agama yang semula mesra dengan tradisi cultural setempat mulai digugat kemurniannya. Agama adalah sakral, sementara tradisi kultural adalah profan dan bagian dari bid'ah. Tradisi lokal patut dibersihkan digantikan dengan ajaran-ajaran agama sebagaimana hadir dari sumbernya yang pertama.

Padahal dengan dialog Budaya dalam bentuk pelaksanaan tradisi lokal dapat membuka perasaan saling memiliki suasana sosial, keterbukaan sosial, menghilangkan rasa curiga, dan sikap fanatik yang berlebihan dalam beragama. Forum-forum pertemuan yang terwadahi dalam tradisi lokal bisa mengkontruksi kebersamaan, rasa saling memiliki hubungan persaudaraan, dan saling mengenal.

Pendekatan yang memungkinkan secara rasional dilakukan untuk memulihkan kerukunan yaitu melalui pendekatan budaya sebagai bentuk tindakan preventif. Pola-pola kerukunan perlu dipetakan untuk mencegah sedini mungkin gejala konflik agama. Ibarat sakit kita sudah mencegah sebelum sakit itu muncul, yaitu misalnya dengan pola hidup sehat. Tidak baru ketika sakit kita berobat.

Dalam konteks Indonesia, ruang kerukunan hanya akan bisa dibentuk ketika budaya masyarakat mampu menciptakan sarana pertemuan diluar konteks agama. Pada posisi inilah dibutuhkan pelestarian arena interaksi umat dari berbagai agama secara alami. Ruang interaksi yang benar-benar tumbuh dari kesadaran umat beragama untuk berbaur dengan kelompok agama lain, bukan arena interaksi yang secara politis dipaksakan.

PENUTUP

Kerukunan umat beragama dimungkinkan akan tumbuh ketika agama

diberikan ruang untuk berdialoq dalam ruang budaya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Dengan dialog, kerukunan beragama akan menjadi nyata melalui peningkatan pemahaman ajaran agama pada masing-masing pengikut/umat beragama; menjunjung tinggi perbedaan dan keanekaragaman pemahaman keagamaan; mengesampingkan pikiran-pikiran yang menganggap pendekatan budaya tidak relevan. Lewat dialog itu pula akan tumbuh kedewasaan beragama, yakni kesanggupan untuk menghormati perbedaan keyakinan dalam beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan. 2010. *Kerukunan Umat Beragama di Kota Denpasar*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Darno. 2010. *Peran FKUB Dalam Kerukunan Antar Umat Beragama di Tabanan*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Fauzi, Romzan. *Peran Pemuka Agama Dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Salatiga*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Haryanto, Joko Tri. 2010. *Interaksi Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Singkawang*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Huntington, Samuel P. 2005. *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta : Qalam.
- Ismail, Arifuddin. *Majelis Taklim Hidayatullah di Perusahaan Non Muslim Kudus : Suatu Fenomena Kerukunan Umat Beragama*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Manopo, Pieter George. 2005. *Revolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas*. Surabaya : PT. Dieta Pratama.
- Mawardi, Marmiati. 2010. *Tokoh Agama Di Tengah Keragaman Etnis dan Agama*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Rachmadhani, Arnis. 2010. *Pola Kerukunan Umat Beragama : Studi Di Kota Pontianak*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Sodli. Ahmad. 2010. *Kerukunan Antra Umat Islam dan Umat Budha di Kecamatan Kaloran*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Sulaiman. 2010. *Pola Kerjasama Antar Umat Beragama di Ambarawa*. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Swellengrebel, J.L.1960. *Bali Studies in Life, Thought, and Ritual*, Ed. The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd.